

SALINAN  
LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.9/M.PPN/HK/02/2024  
TANGGAL 13 FEBRUARI 2024

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN 2024

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Revisi Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus.	Direktorat Pembangunan Daerah
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.	Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang tentang Manajemen Risiko di Kementerian PPN/Bappenas.	Biro Umum
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian PPN/Bappenas.	Biro Umum
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Manajemen Pengetahuan SPBE di Kementerian PPN/Bappenas.	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pendanaan Inovatif untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara, Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.	Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyusunan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana.	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana.	Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan dan Pengalokasian Anggaran Pendidikan.	Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Kelola Registrasi Sosial Ekonomi dalam Kerangka Kebijakan Satu Data Indonesia.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Panduan Musrenbang Otsus.	Direktorat Regional III
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Kementerian PPN/Bappenas.	Biro Hukum


17. Rancangan ...

NO	JUDUL	PEMRAKARSA
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.	Biro Hukum
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.	Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian PPN/Bappenas	Biro Humas, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Pengelolaan Proyek Prioritas.	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas 2025-2029.	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 

  
Teni Widuriyanti